

ABSTRAK

Kebijakan moratorium penempatan TKI pengguna perseorangan ke 19 negara Timur Tengah berdasar adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan pada pertimbangan martabat dan harga diri bangsa diberlakukan sejak Juli 2015. Terintegrasi dengan Roadmap Nol Penempatan TKI PLRT 2017, kebijakan moratorium ini didesain berlaku permanen. Melalui kerangka berpikir kebijakan luar negeri dan analisis kebijakan luar negeri yang berfokus pada lingkungan politik domestik, penelitian ini menjelaskan faktor pendorong pemberlakuan kebijakan moratorium. Dengan menggunakan studi pustaka dan analisis data kualitatif, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian eksplanatif ini mendukung hipotesis bahwa pemberlakuan kebijakan moratorium TKI pengguna perseorangan ke 19 negara Timur Tengah dipengaruhi oleh adanya narasi nasionalis asertif dalam lingkungan politik domestik yang mempengaruhi berkembangnya persepsi elit politik terkait pengiriman TKI PLRT sebagai bentuk penurunan martabat bangsa. Kebijakan moratorium juga ditengarai dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah untuk memperluas konstituen dan mobilisasi oposisi.

Kata-Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Moratorium, Lingkungan Politik Domestik, Persepsi Elit Politik, Perluasan Konstitu